

Senin, 05 Juli 2010

Depan Opini Anda Bursa Kerja Piala Dunia Match Photo Gallery

## Perda RTRW Daerah Harus Merujuk Provinsi

Jumat, 02 Juli 2010 14:07



**TEKEN KOMITMEN:** Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi dan Bupati Kabupaten/Kota se NTB menandatangani kesepakatan bersama terkait pemanfaatan dan pengendalian ruang di NTB. Tampak Bupati Lobar Dr H Zaini Arony saat meneken kesepakatan.

### Sosialisasi Perda RTRW NTB

MATARAM-Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi menekankan agar pemda kabupaten/kota segera menindaklanjuti penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) NTB dengan Perda sejenis di tingkat kabupaten/kota.

Hal ini diungkapkan Gubernur NTB saat membuka sosialisasi Perda nomor 3/2010 tentang RTRW NTB di Hotel Grand Legi Mataram, kemarin. "Percepatan penyelesaian RTRW di tingkat kabupaten kota sebagai turunan RTRW Provinsi ini harus segera dilakukan," kata Gubernur.

Dikatakan, fenomena konversi lahan, berkurangnya kualitas pemukiman, serta

persoalan pemanfaatan ruang dan lainnya menjadi persoalan yang muncul seiring dengan perkembangan dan pembangunan daerah. Sehingga, kata Gubernur, perlu diatur dalam dokumen perencanaan tata ruang.

Gubernur dari kalangan ulama ini juga menekankan perlunya komitmen dan kepedulian dalam pemanfaatan ruang. Dan persoalan ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, namun menjadi kewajiban semua pihak. "Semua pihak harus paham, sadar dan peduli dengan keberadaan RTRW ini," tandas Gubernur yang juga ketua Dewan Tanfidziyah PBNW ini.

Sebagai bentuk implementasi dan komitmen bersama atas Perda 3/2006 ini, Pemprov NTB dan pemda kabupaten/kota se-NTB meneken kesepahaman bersama terkait pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mewujudkan NTB Bersaing. Sehingga, RTRW yang mencakup arahan pembangunan NTB ke depan bisa menjadi blue print pembangunan daerah.

Dalam RTRW NTB ini ditetapkan sekitar 16 kawasan strategis provinsi, namun belum semua kawasan ini sudah disentuh pembangunan karena terkait keterbatasan anggaran. Dan kawasan yang sudah dikembangkan pola pemanfaatannya cenderung tidak memperhatikan daya dukung dan persoalan lingkungan. "Bahkan ada aktifitas pengembangan yang tidak terpadu dan ilegal," paparnya.

Dalam acara ini sejumlah Bupati langsung menghadiri penandatanganan MoU ini, seperti Bupati Lobar Dr H Zaini Arony, Bupati Loteng HL Wiratmaja, Bupati Lotim HM Sukiman Azmy dan Penjabat Bupati KLU H Ridwan Hidayat. Sedangkan Bupati/Wali kota lainnya diwakili pejabat terkait.

Sosialisasi yang diselenggarakan Pemprov NTB, Kementerian Pekerjaan Umum dan WWF Indonesia ini juga menghadirkan dua pembicara dari pemerintah pusat, yakni Direktur Penataan Ruang Wilayah III Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU dan Direktur Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Bappeda NTB Rosyadi Sayuti mengatakan, sosialisasi ini terselenggara berkat kerjasama Pemprov NTB,

Kementrian Pekerjaan Umum dan WWF Indonesia. "Peserta sosialisasi ini terdiri dari pemda Kabupaten/Kota, kalangan akademisi, LSM dan perwakilan media massa," kata Rosyadi selaku ketua panitia saat memberikan sambutan.

Informasi yang dihimpun Lombok Post, sejumlah kabupaten/kota tengah menggodok dokumen RTRW masing-masing, salah satunya adalah kabupaten Lombok Barat yang menargetkan dokumen ini bisa tuntas tahun ini. "Sedang kita godok dan kita targetkan tuntas tahun ini," ujar kepala Bappeda Lobar HM Taufiq. (mni)

Komentar (0) 

## Tulis komentar

**Nama**

**E-mail**

**Jabatan**

**Komentar**

kecilkan | besarkan

[. Kontak kami .](#) [. Links ..](#) [Info Iklan 2009 .](#)

Lombok Post! Harian Pagi Pertama dan Terbesar di Nusa Tenggara

© Copyright 2009, All Rights Reserved